

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana pemilik, keterlibatan orang selain agen dalam pelaksanaan aktivitas jasa berwenang untuk membuat keputusan atas nama mereka keputusan Meckling, (2016) oleh karena itu manajer berperan penting untuk pengambilan keputusan di perusahaan. Ketika kedua belah pihak bertindak ada alasan untuk percaya bahwa mereka ingin memaksimalkan kepentingan mereka sendiri bahwa broker (agensi) tidak selalu bertindak untuk kepentingan pemilik Meckling, (2016). Hal ini menunjukkan adanya konflik, kepentingan antara manajer dan pemilik. Manajer memiliki lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga dapat menyebabkan masalah agensi.

Masalah broker (agensi) menyebabkan biaya broker (agensi), yaitu potongan nominal dinilai kesejahteraan pemilik pada perbedaan kepentingan pemegang saham dan perwakilan Meckling, (2016) berbagi biaya agensi menjadi tiga bagian, yaitu *tracking cost*, *matching cost*, dan sisa kerugian. Biaya pemantauan adalah biaya perilaku pemantauan seorang agen *Linkage cost* adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan menghubungkan agen dengan rekanan pemilik, yang biaya depositnya juga ditanggung oleh agen. kerugian

sisanya (*residual loss*) merupakan efek kekayaan dari fakta bahwa tindakan diambil, misalnya, saat pengeluaran dan komitmen dikendalikan perilaku agen terkadang berbeda dengan perilaku untuk memaksimalkan kepentingan pemilik.

Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola pendapatan Amidu, (2016). Efek dari tindakan Penghindaran pajak merupakan pengurangan beban pajak yang harus dilakukan dibayar oleh perusahaan. Ini mengarah pada keuntungan yang lebih tinggi perusahaan sehingga manajer mendapatkan insentif yang lebih tinggi.

Penipuan pajak membawa serta masalah keagenan ketika pemegang saham dan manajer mempertimbangkan biaya dan manfaat penghindaran pajak dengan cara lain contoh Biaya verifikasi adalah biaya ujian. Itu tugas pemeriksaan Pengurangan asimetri informasi angka akuntansi dan minimalkan kerugian residual melalui manajemen yang nyaman dalam pelaporan keuangan. Masalah ini menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat menyebabkan masalah agensi dapat dikurangi, misalnya dengan memantau biaya membayar cek.

Potensi benturan kepentingan dapat diminimalisir melalui harmonisasi mekanisme pemangku kepentingan eksternal dan internal yang diketahui seperti tata kelola perusahaan, yaitu mekanisme yang mengontrol perusahaan sehingga dapat beroperasi secara efisien dan mencapai kedua kepentingan pemangku kepentingan eksternal dan

internal. Fungsi dari struktur administrasi adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, transparansi dan pengurangan konflik agensi.

2.1.2 *Pecking Order Theory*

Pecking Order Theory menjelaskan bahwa struktur pendanaan suatu perusahaan mengikuti suatu hierarki dimulai dari sumber dana termurah, dana internal hingga saham sebagai sumber terakhir. Jika struktur modal perusahaan dapat mengurangi biaya modalnya maka manajemen struktur modal merupakan hal penting dalam manajemen keuangan Halomoan, (2016). *Pecking order theory* juga menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang *profitable* umumnya lebih memilih untuk meminjam dana dalam jumlah sedikit. Sedangkan perusahaan yang kurang *profitable* cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dana internalnya tidak mencukupi dalam membiayai kebutuhan operasionalnya.

2.1.3 *Tax Avoidance*

2.1.3.1 *Pengertian Tax Avoidance*

Tax Avoidance (Penghindaran pajak) adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan pembebasan dan pengurangan yang diperbolehkan atau pajak tangguhan yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku Rahmayani, (2019).

Sedangkan menurut Sihotang, (2020) Penghindaran pajak adalah upaya untuk menambah beban pajak wajib pajak dengan cara tertentu dengan menghindari pemungutan pajak atas berbagai transaksi tidak kena pajak. Menurut Syahputri, (2019) kita berbicara tentang penghindaran pajak ketika sebuah perusahaan, seperti wajib pajak, berusaha membayar utang sesedikit mungkin, sementara di sisi lain negara membutuhkan dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Beban pajak yang tinggi pada manajemen perusahaan melemahkan *bottom line* perusahaan, yang mendorong manajemen untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai cara, baik legal maupun ilegal.

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan pengertian penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Perpajakan dengan tujuan untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Dalam arti lain, perusahaan dengan sengaja melakukan penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran yang harus dibayarkan kepada Negara, dengan

dilakukannya penghindaran pajak akan dapat meningkatkan *cash flow* perusahaan.

2.1.3.2 Karakteristik Tax Avoidance

Menurut Erly Suandy, (2017) komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* terdapat 3 karakteristik *Tax Avoidance*, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak.

2.1.3.3 Jenis – Jenis Perlawanan Tax Avoidance

Tax avoidance tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran undang- undang perpajakan karena dalam hal ini wajib pajak melakukan usaha meminimumkan atau meringankan beban pajak dengan ketentuan yang telah dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Meskipun telah di

upayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak Purwono, (2016) Perlawanan tersebut dapat berupa :

1. Perlawana Pasif

Perlawanan pajak secara pasif merupakan perlawanan yang keterjadiannya berkaitan erat dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, dan teknik pemungutan pajak

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif yang meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak melalui penghindaran diri dari wajib pajak, pengelakan diri dari wajib pajak, dan melalaikan pajak.

2.1.3.4 Skema Tax Avoidance

Menurut Rahayu, (2016) terdapat beberapa skema yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing untuk melakukan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut :

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing menurut Antonius, (2016) diartikan sebagai transaksi pertukaran produk atau jasa yang

terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan dengan tujuan tertentu.

2. *Thin Capitalization*

Lathifa (2019) mendefinisikan *thin capitalization* sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.

3. *Treaty Shopping*

Menurut Dahlan (2018) *treaty shopping* adalah suatu skema yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

4. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Controlled foreign corporation (CFC) menurut Lathifa (2019) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax haven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.1.3.5 Pengukuran Tax Avoidance

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam perhitungan penghindaran pajak salah satunya yaitu CETR (*Cash Effective Tax Rate*) karena baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan. CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rasio CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Semakin besar nilai CETR menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak suatu perusahaan dan sebaliknya semakin kecil nilai CETR menunjukkan semakin besar tingkat penghindaran pajak.

Menurut Setiyono E, (2019) perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila CETR (*Cash Effective Tax Rate*) kurang dari 25%, dan apabila CETR (*Cash Effective Tax Rate*) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu karena ukuran ini sering digunakan sebagai proksi penghindaran pajak dalam riset Nurjannah, (2017) adalah sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

2.1.4 *Earning Stripping Rules*

2.1.4.1 Pengertian *Earning Stripping Rules*

Earning Stripping Rules adalah membatasi pembayaran bunga kepada pihak berelasi, melainkan juga memberlakukan aturan pembatasan tersebut kepada pihak yang tidak berelasi. Pendekatan ini menggunakan titik kritis ambang batas tertentu untuk membatasi penggunaan biaya bunga sebagai unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak Kareser, (2008).

Earning Stripping Rules adalah dimaksudkan untuk mencegah praktik - praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui pos rekening beban bunga pinjaman. Mekanisme perlakuan *earning stripping rules* (ESR) ini adalah dengan cara membandingkan beban utang dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi, pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi. apabila beban utang yang akan dibayarkan telah melebihi rasio tertentu atas pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi maka beban utang selewat batas rasio itu tidak dapat dihitung sebagai pengurang basis pajak penghasilan.

2.1.4.4 Pengukuran *Earning Stripping Rules*

Penggunaan metode ESR diatur lewat peraturan pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 ttentang penyesuaian

pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan salah satu turunan dari undang – undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP). ESR juga dikenal dengan sejumlah sebutan lain seperti *Fixed ratio rules* dan *interest to operating profit ratio rule*. Cara kerja ESR adalah membandingkan beban biaya utang dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi (*Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization* atau EBITDA). ESR melengkapi metode yang selama ini diterapkan yaitu perbandingan antara besaran utang terhadap modal alias *Debt to Equity Ratio*

$$ESR = \frac{\text{Biaya Utang}}{\text{Pendapatan Usaha}}$$

2.1.5 Debt to Equity Ratio

2.1.5.1 Pengertian Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir, (2013) menyatakan bahwa *Debt Equity Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Menurut Hery, (2021) Rasio Utang terhadap Modal (*Debt Equity Ratio*) merupakan rasio yang digunakan dalam

mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Debt Equity Ratio* (DER) merupakan suatu rasio yang dijadikan sebagai gambaran untuk menilai modal yang bersumber dari utang perusahaan dan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dana yang disediakan oleh kreditor kepada perusahaan.

2.1.5.2 Unsur- Unsur *Debt to Equity Ratio*

Dalam mengukur seberapa proporsi perusahaan dibiayai dengan utang salah satunya dapat dilihat melalui *Debt to Equity Ratio*, karena rasio ini dicari dengan membandingkan seluruh utang dengan total modal. Dengan begitu unsur-unsur *Debt to Equity Ratio* adalah utang dan modal. Secara umum utang (*liabilities*) terbagi dalam dua golongan, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan peminjaman dana atau kewajiban yang sifatnya darurat namun tetap bisa dikembalikan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun. Sedangkan utang jangka panjang yaitu kewajiban pada pihak tertentu yang wajib dilunasi dengan jangka waktu yang melebihi satu tahun dihitung sejak tanggal pembuatan neraca. Utang yang termasuk dalam kategori kewajiban ini misalnya

utang obligasi, utang hipotek, dan utang bank atau kredit investasi.

Adapun modal (*equity*) merupakan kekayaan perusahaan yang bisa berasal dari internal maupun eksternal termasuk juga kekayaan yang dihasilkan dari proses produksi sebuah perusahaan. Unsur ekuitas ini dapat diklasifikasi lebih jauh menjadi dua klasifikasi yaitu ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik misalnya modal saham dan ekuitas yang berasal dari hasil operasi yaitu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik misalnya dalam bentuk dividen.

2.1.5.3 Faktor – Faktor yang mempengaruhi *Debt to Equity Ratio*

Menurut Darmawan (2020) Faktor yang mempengaruhi *Debt to Equity Ratio* tersebut diantaranya :

1. Tingkat Stabilitas dan prediktabilitas lingkungan bisnis

Rasio utang terhadap ekuitas yang rendah cocok untuk perusahaan yang beroperasi di bawah lingkungan bisnis yang fluktuatif dan tidak dapat diprediksi karena mereka tidak mampu membayar komitmen keuangan yang tidak dapat mereka penuhi jika terjadi penurunan tiba – tiba dalam kegiatan ekonomi.

2. Ketersediaan Asset yang cocok untuk menawarkan keamanan kepada pemberi pinjaman

Ketersediaan asset yang dimiliki untuk penggunaan jangka dimiliki untuk penggunaan jangka pendek dan tidak tunduk pada *fluktuasi drastic* dalam penilaian mereka dalam kondisi normal (misalnya bangunan) meningkatkan apatit organisasi untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang lebih tinggi karena ia menawarkan keamanan yang lebih baik kepada pemberi pinjaman jika terjadi *default*. Sebaliknya, dimana sebagian besar asset ditahan dalam jangka pendek (misalnya asset tidak berwujud), organisasi untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi berkurang karena asset tersebut menawarkan tingkat keamanan yang lebih rendah untuk pemberi pinjaman jika terjadi *default*.

3. Cakupan bunga (*interest coverage*)

Rasio cakupan bunga yang sehat menunjukkan bahwa lebih banyak pinjaman dapat diperoleh tanpa mengambil risiko yang berlebihan dan sebaliknya.

4. Pembatasan regulasi dan kontrak

Kewajiban pengaturan dan kontrak harus diingat ketika mempertimbangkan pembiayaan utang.

2.1.5.4 Manfaat *Debt to Equity Ratio*

Semakin besarnya *Debt to Equity Ratio* maka menunjukkan semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengatur rasio ini dengan baik agar memberikan manfaat pada perusahaan. Dalam Kasmir, (2013) Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang

Adapun manfaat dari *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi total kewajiban perusahaan kepada kreditor, khususnya jika dibandingkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan.
2. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang.
3. Untuk menilai seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh modal.
4. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang dan modal terhadap pembiayaan aset perusahaan.
5. Untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang.

2.1.5.5 Pengukuran *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Kasmir, (2018) rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

2.1.6 *Net Profit Margin*

2.1.6.1 *Pengertian Net Profit Margin*

Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba adalah Marjin Laba Bersih (*net profit margin*) yang merupakan salah satu jenis dari rasio *profitabilitas*.

“Pengertian rasio *profitabilitas* adalah merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Keuntungan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan, sehingga

menghasilkan keuntungan pada perusahaan” Septiana, (2019).

“*Net Profit Margin* menunjukkan kinerja perusahaan yang dilihat dari kemampuan pendapatan bersih terhadap nilai penjualan perusahaan” Lukman, (2018).

Menurut Sujarweni, (2017) “*Net Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan atau pendapatan”

“NPM yang tinggi dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus karena dapat menghasilkan laba bersih yang besar melalui aktivitas penjualannya sehingga saham perusahaan tersebut banyak diminati investor dan akan menaikkan harga saham perusahaan tersebut” Sari, (2018).

Berdasarkan pengertian diatas, *Net Profit Margin* merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dan merupakan alat untuk mengukur keefektifan keuntungan yang diperoleh perusahaan, caranya dengan menghitung laba bersih setelah pajak yang diperoleh perusahaan dibandingkan dengan penjualan/pendapatan bersih perusahaan selama satu periode. Rasio ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur semakin baik

atau semakin buruk kinerja perusahaan dalam memperoleh laba yang diharapkan.

2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat *Net Profit Margin*

“Tujuan *Net Profit Margin* adalah untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu (laba bersih setelah pajak), untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, dan untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu” Shabrina, (2020).

Menurut Kasmir, (2018) Tujuan penggunaan rasio profitabilitas dimana salah satu jenisnya adalah *Net Profit Margin* bagi perusahaan, dan pihak luar perusahaan, sebagai berikut:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.

Manfaat rasio profitabilitas :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan manfaat lainnya

2.1.6.3 Komponen – Komponen *Net Profit Margin*

Komponen-komponen yang dapat mempengaruhi nilai *Net Profit Margin* pada suatu perusahaan sebagai berikut:

1. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Interest and Tax*)

“Laba bersih merupakan kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi pajak penghasilan yang

disajikan dalam bentuk laporan laba rugi” Kasmir, (2018)

“Laba bersih adalah laba setelah pajak (*earnings after tax*) adalah laba yang diperoleh setelah dikurangi pajak yang dihasilkan dari proses penjualan” Triani et al., (2020).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laba bersih setelah pajak adalah penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari *net operating income* (usaha pokok) ataupun *non operating income* (di luar usaha pokok) perusahaan selama satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan.

2. Pendapatan/Penjualan Bersih

“Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi yang berasal dari aktivitas operasi dalam hal ini penjualan barang kredit yang merupakan unit usaha pokok perusahaan” Lestari, (2019).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Dalam komponen dan pengukuran Net Profit Margin selain pendapatan bersih, juga bisa menggunakan penjualan bersih. Penjelasannya sebagai berikut:

“Penjualan yaitu upaya untuk menyediakan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada konsumen dengan harga yang disepakati untuk membujuk konsumen agar membeli barang atau jasa yang ditawarkan” Triani et al., (2020)

“Penjualan bersih merupakan penjualan yang didapat dari penjualan kotor serta dikurangi return penjualan dan ditambah potongan penjualan lainnya” Lestari, (2019).

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa penjualan bersih merupakan hasil penjualan bruto atau kotor yang di peroleh perusahaan dan berasal dari transaksi penjualan barang, kemudian dikurangi dengan berbagai potongan seperti retur penjualan dan potongan penjualan. Semakin besar penjualan, dapat mempengaruhi besarnya keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan.

2.1.6.4 Faktor – Faktor yang mempengaruhi *Net Profit Margin*

1. *Current Ratio* / Rasio Lancar

Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek (maksimal satu tahun) yang akan jatuh tempo. Jika perusahaan memutuskan menetapkan modal kerja maka kesempatan untuk mendapatkan laba yang besar, juga akan menurun dan akan berdampak pada menurunnya *profitabilitas*. Sebaliknya, jika perusahaan berupaya memaksimalkan *profitabilitas* maka akan mempengaruhi tingkat *likuiditas* perusahaan.

2. *Sales Growth*/ Pertumbuhan Penjualan

Kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi besarnya kecilnya nilai *Net Profit Margin*.

3. *Inventory Turnover Ratio*/ Ratio Perputaran Persediaan

Rasio yang menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan dalam produksi yang normal, semakin besar rasio maka semakin baik. Karena dianggap kegiatan penjualan semakin cepat, hal ini berhubungan dengan laba yang akan meningkat. Dapat disimpulkan jika perputaran persediaan semakin cepat maka akan berpengaruh positif terhadap *profitabilitas*.

4. *Receivable Turnover Ratio*/ Rasio Perputaran Piutang

Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efektifitas perusahaan dalam mengelola piutangnya. Semakin cepat perputaran piutang maka akan berpengaruh positif terhadap *profitabilitas* dan juga sebaliknya.

5. *Working Capital Turnover Ratio*/ Rasio Perputaran

Modal Kerja Rasio yang menunjukkan modal kerja dengan penjualan, rasio ini akan menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh dari perusahaan dalam jumlah rupiah untuk tiap modal kerja, hal ini akan mempengaruhi *profitabilitas* yang di peroleh perusahaan

2.1.6.5 Pengukuran *Net Profit Margin*

“*Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kegiatan-kegiatan yang telah digunakan oleh pimpinan perusahaan dalam mengendalikan biaya, penerimaan pasar terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan dan sebagainya, semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM) semakin baik operasi perusahaan” Rambe, (2018) Rumus Rasio Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*):

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}}$$

“Semakin tinggi margin laba bersih berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari pendapatan. Hal ini disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan, Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih berarti semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari pendapatan” Hery, (2017)

“Perusahaan dikatakan memiliki *net profit margin* yang baik apabila hasil perhitungannya adalah lebih dari 5%. Semakin tinggi nilai net ini, maka perusahaan dinilai efisien untuk menentukan harga penjualan produknya” Daya, (2021).

2.1.7 Firm Size

2.1.7.1 Pengertian Firm Size

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva.

Jadi ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai manajemen dan sumber dana yang dimiliki untuk melakukan *tax planning* yang baik, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan *tax planning* dikarenakan ada kemungkinan menjadi sasaran dari keputusan dan kebijakan pemerintah Ardyansyah, (2016).

2.1.7.2 Manfaat dan Tujuan *Firm Size*

Keadaan yang dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki. Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien.

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total aset yang dimiliki. Ukuran

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut Sawir, (2016) :

- 1) Tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal
- 2) Kekuatan tawar menawar dalam kontrak keuangan
- 3) Pengaruh skala dalam biaya dan return.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena semakin besar perusahaan, biasanya mereka mempunyai kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tinggi karena didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan seperti peralatan yang memadai dan sejenisnya dapat diatasi.

Ada 3 teori yang secara implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan dengan tingkat keuntungan perusahaan yaitu sebagai berikut Yuliani Nuraini Sujiono, (2016):

- 1) Teori Teknologi yang menekankan pada modal fisik, *Economic of Scale*, dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap keuntungan.

- 2) Teori Organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi.
- 3) Teori Institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor seperti sistem perundang-undangan, peraturan antitrust, perlindungan patent, ukuran pasar, dan perkembangan pasar keuangan.

2.1.7.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi *Firm Size*

Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan dalam laba Ardyansyah, (2016).

Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan. Sebaliknya perusahaan yang kecil dimana sahamnya hanya tersebar di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan

hilangnya kontrol pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan

2.1.7.4 Pengukuran *Firm Size*

Ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan mengemukakan bahwa: “Aset total dapat menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya perusahaan tersebut semakin besar” (Prasetyantoko, 2016). Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva” (Sartono, 2016).

Rumus ukuran perusahaan adalah sebagai berikut :

$$Firm\ Size = LN\ (Total\ Aaset)$$

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log total aktiva karena untuk memudahkan penelitian disebabkan oleh jumlah total aktiva perusahaan mencapai puluhan triliun sedangkan variabel dependen maupun independen menggunakan skala

pengukuran rasio oleh sebab itu, ukuran perusahaan diukur menggunakan log total aktiva.

2.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dan dari beberapa penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Tinjauan relevan yang mendasari penelitian ini diantaranya :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Return On Asser, Debt to Equity Ratio</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Bobby Arisandi, Cris Kuntadi Vol 2 No. 3 tahun 2024)	Neraca : Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi	Variabel Independen: <i>Return On Asset</i> (X1) <i>Debt to Equity Ratio</i> (X2) Ukuran perusahaan (X3) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1. <i>Return On Asset</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 2. <i>Debt to equity ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . 3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Pengaruh Dewan Direksi, Direksi Wanita, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . (William, Menik Indrati Vol. 4 No. 1 Tahun 2024)	<i>Innovative : Journal Of Social Science Research</i>	Variabel Independen : Dewan Direksi (X1) Direksi Wanita (X2) Profitabilitas (X3) Leverage (X4) Ukuran Perusahaan (X5) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1.Direktur wanita dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Dewan Direksi, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, <i>Current Ratio</i> , dan <i>Debt to Equity Ratio</i> terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar yang terdaftar di BEI (William Sugiato, Letersia Br. Gurusinga Vol. 4 No. 1 Tahun 2023)	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal</i> (MSEJ)	Variabel Independen: Pertumbuhan Penjualan (X1) <i>Current Ratio</i> (X2) <i>Debt to Equity Ratio</i> (X3) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1. <i>Debt to Equity Ratio</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Pertumbuhan Penjualan dan <i>Current Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Rohima, Said Kelana Asnawi, Ake Wihadanto, 2023)	Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen	Variabel Independen: Transaksi Pihak Berelasi (X1) Pertumbuhan Penjualan (X2) Profitabilitas (X3) Ukuran Perusahaan (X4) Leverage (X5) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1. Transaksi Pihak Berelai dan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak
5	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan . Capital Intesity, dan Leverage terhadap penghindaran pajak (Widyadhari Ramadhani Pramesti, Clara Susilawati Vol. 6 No. 1 Tahun 2024)	Reslaj: <i>religion Education Social Laa Roiba Journal</i>	Variabel Independen: Kompensasi Manajemen (X1) Umur Perusahaan (X2) Pertumbuhan Penjualan (X3) Capital Intensity (X4) Levarege (X5)	1. Kompenasi Manajemen, Capital Intensity dan Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. umur perusahaan, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

			Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	
6	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, dan Intesitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2022 (Elda permata Anastasya, Rully Priantilianingtiasari Vol. 6 No. 2 Tahunn 2024)	Al – Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah	Variabel Independen : Pertumbuhan Penjualan (X1) Intensitas Modal (X2) Intensitas Persediaan (X3) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1.Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2.Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	Pengaruh <i>Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Related Party Transaction</i> , terhadap penghindaran pajak (Fitri Karina Nindita, Arief rahman, Siti Rosyafah Vol. 1 No. 2 Tahun 2021)	UBHARA: Accounting Journal	Variabel Independen: <i>Debt to Equity ratio</i> (X1) <i>Return On Asset</i> (X2) <i>Related Party Transaction</i> (X3) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	1.DER berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3.RPT tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Jurnal	Variabel	Hasil Penelitian
	Pengaruh <i>Net Profit Margin, Current Ratio</i> , dan <i>capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun	Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila	Variabel Independen: <i>Net Profit Margin</i> (X1) <i>Current Ratio</i> (X2) <i>Capital Intensity</i> (X3)	1.NPM dan CR berpengaruh terhadap tax avoidance. 2.Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance

8	2017-2019) (Bani Akbar Khatami, Indah Masri, Bambang Suprayitno Vol. 1 No. 1 Tahun 2021)		Variabel Dependensi : <i>Tax Avoidance</i> (Y)	
---	--	--	---	--

Sumber: data diolah 2024

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari ilmu atau teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dipakai sebagai landasan teori yang dihubungkan dengan variabel yang diteliti.

2.3.1 Pengaruh *Earning Stripping Rules* terhadap *Tax Avoidance*

Earning Stripping Rules adalah dimaksudkan untuk mencegah praktik- praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui pos rekening beban bunga pinjaman. Mekanisme perlakuan *earning stripping rules* (ESR) ini adalah dengan cara membandingkan beban utang dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi, pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi. Apabila beban utang yang akan dibayarkan telah melebihi rasio tertentu atas pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi maka beban utang selewat batas rasio itu tidak dapat dihitung sebagai pengurang basis pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rena Lutfiani,(2024) dan Reisa Mahardika, (2022) menyatakan bahwa *Earning Stripping Rules* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal, (2022) menyatakan bahwa *earning stripping rules* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh *Debt to Equity Ratio* terhadap *Tax Avoidance*

Debt to Equity Ratio adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan Kasmir, (2016). DER merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas perusahaan. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas Kasmir, (2018).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bobby Arisandi, (2024) dan Ikeu Ageng Aprianti, (2024) menyatakan bahwa *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2024) dan Mufiana, (2024) menyatakan *Debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Pengaruh *Net Profit Margin* terhadap *Tax Avoidance*

Net Profit Margin adalah salah satu dari beberapa rasio profitabilitas. Pada umumnya *net profit margin* ini berfungsi untuk

mengukur tingkat pengembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersih dan mengukur seberapa efisien manajemen dalam mengelola perusahaannya. *Net Profit Margin* dihitung dengan membagi laba meningkat yang diperoleh dari penjualan bersih. Hal ini mungkin disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan, sebaliknya, jika margin laba bersih rendah berarti laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih akan rendah. Hal ini dapat terjadi karena tingginya beban pajak dalam periode tertentu atau rendahnya laba sebelum pajak penghasilan Fahmi, (2017).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh William, (2024) dan Bani Akbar Khatami, (2021) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, (2019) dan Shinta Budianti, (2018) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.4 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Firm Size yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi: total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya Hasibuan, (2016). Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar

lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut Richardson, (2016).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, (2024) dan Ratih Qadartil Anjilni, (2024) menyatakan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cikal Sari Dewi, (2024) dan Mernawati, (2024) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.5 Pengaruh *Earning Stripping Rules*, *Debt to Equity*, *Net Profit margin*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Earning Stripping Rules adalah dimaksudkan untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui pos rekening beban bunga pinjaman. Mekanisme perlakuan *Earning Stripping Rules* (ESR) ini adalah dengan cara membandingkan beban utang dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi, pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi. apabila beban utang yang akan dibayarkan telah melebihi rasio tertentu atas pendapatan usaha sebelum dikurangi pinjaman, pajak, penyusutan, dan amortisasi maka beban utang selewat batas rasio itu tidak dapat dihitung sebagai pengurang basis pajak penghasilan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rena Lutfiani, (2024) dan Reisa Mahardika, (2022) menyatakan bahwa *Earning Stripping Rules* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal, (2022) menyatakan bahwa *Earning Stripping Rules* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Debt to Equity Ratio adalah rasio keuangan utama dan digunakan untuk menilai posisi keuangan suatu perusahaan Kasmir, (2016). DER merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur utang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar, dengan seluruh ekuitas perusahaan. *Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas Kasmir, (2018).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bobby Arisandi, (2024) dan Ikeu Ageng Aprianti, (2024) menyatakan bahwa *Debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amalia, (2024) dan Mufiana, (2024) menyatakan *Debt to equity ratio* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Net Profit Margin adalah salah satu dari beberapa rasio profitabilitas. Pada umumnya net profit margin ini berfungsi untuk mengukur tingkat pengembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersih dan mengukur seberapa efisien manajemen dalam

mengelola perusahaannya. *Net Profit Margin* dihitung dengan membagi laba meningkat yang diperoleh dari penjualan bersih. Hal ini mungkin disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan, sebaliknya, jika margin laba bersih rendah berarti laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih akan rendah. Hal ini dapat terjadi karena tingginya beban pajak dalam periode tertentu atau rendahnya laba sebelum pajak penghasilan Fahmi, (2017).

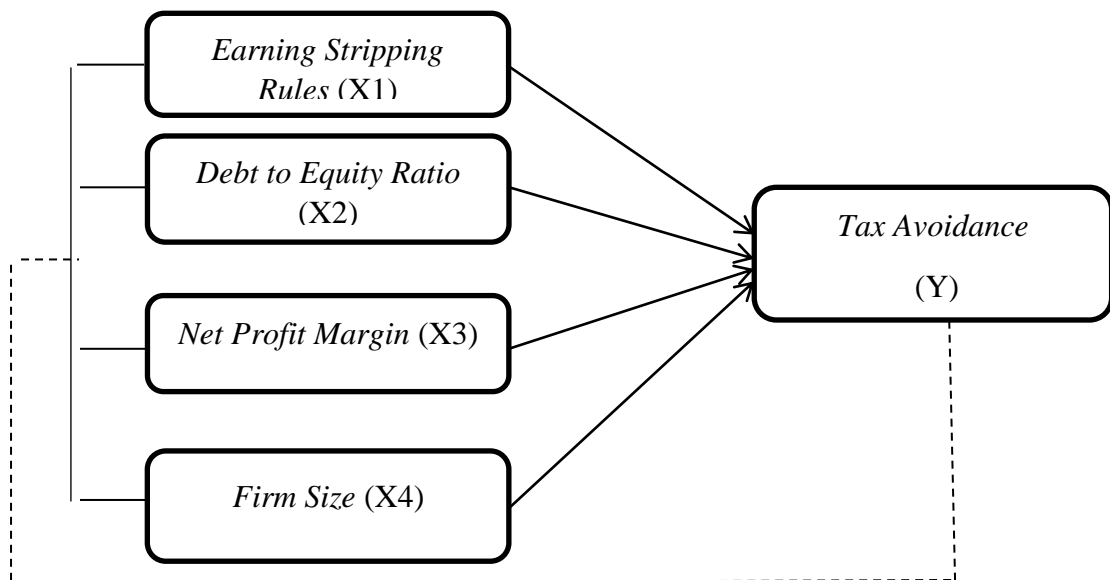
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh William, (2024) dan Bani Akbar Khatami, (2021) menyatakan bahwa *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud, (2019) dan Shinta Budianti, (2018) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Firm Size yaitu skala yang diklasifikasikan menjadi besar ataupun kecilnya perusahaan menurut berbagai cara meliputi total aktiva, kapitalisasi pasar, penjualan dan lainnya Hasibuan, (2016). Hipotesis biaya politik memprediksi bahwa perusahaan yang besar akan menggunakan metode akuntansi yang cenderung mengurangi laba yang akan dilaporkan dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus ditanggung. Semakin besar ukuran perusahaan dimungkinkan bahwa perusahaan memiliki relasi dengan pihak luar lebih banyak dibandingkan perusahaan kecil, hal ini memudahkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Semakin rendah *Cash*

Effective Tax Rate (CETR) yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran suatu perusahaan tersebut Richardson, (2013).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningsih, (2024) dan Ratih Qadartil Anjilni, (2024) menyatakan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cikal Sari Dewi, (2024) dan Mernawati, (2024) menyatakan bahwa *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Adapun kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian yaitu sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual
Sumber : data diolah

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan suatu penjelasan sementara perilaku atau keadaan pernyataan yang ada telah terjadi. Hipotesis adalah dugaan

atau jawaban sementara dari pernyataan yang ada pada perumusan masalah penelitian Azuar Juliandi, (2016).

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan dalam penelitian ini, maka hipotesis yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. *Earning Stripping Rules* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI.
2. *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI.
3. *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI.
4. *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI.
5. *Earning Stripping Rules*, *Debt to Equity Ratio*, *Net Profit Margin*, dan *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI.

